

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri menggunakan sistem Self Assessment, yaitu wajib pajak diwajibkan untuk menghitung besarnya pajak, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, yaitu dengan tarif pajak 10 % dan dasar Pengenaan pajak Kegiatan Membangun Sendiri 20 % dikalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak pada bulan sebelumnya dan dibayar paling lambat tanggal 15 serta dilaporkan ke Kantor Pelayanan pajak Pratama pada tanggal 20. Untuk itu wajib pajak diwajibkan membuat catatan-catatan pengeluaran atau RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan menyimpan bukti-bukti pengeluarannya.
2. Fiscus memiliki peranan yang sangat penting dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri . Adapun usaha yang dilakukan antara lain :
 - a. Memberikan penyuluhan pada wajib pajak untuk mentaati semua aturan pajak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri .
 - b. Melakukan Pengawasan melalui Seksi Pengawas dan Konsultasi III dan Ekstensifikasi dan melakukan survey di seluruh wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

- c. Melakukan kerja sama dengan Instansi lain seperti Dinas tata Kota untuk memperoleh data IMB dan Real Estate yang ada di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan untuk membuat laporan setiap penjualan tanah kavelingnya. Sehingga dapat diketahui wajib pajak terkena peraturan PPN atas KMS atau tidak.
 - d. Memberikan teguran dan himbauan kepada Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dan memberikan konsultasi setelah wajib pajak datang memenuhi surat teguran maupun himbauan.
 - e. Menindaklanjuti hasil pengawasan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) melalui hasil verifikasi atau pemeriksaan.
- 3. Hambatan–hambatan yang di hadapi dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri anatara lain kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pemungutan PPN kegiatan membangun sendiri, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memnuhi kewajibannya, hingga sampainya Surat himbauan dan atau Teguran kepada pemilik bangunan/Wajib Pajak**

B. Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut ini:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan harus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya

dengan melaksanakan sosialisasi, baik langsung maupun dengan menggunakan media.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan sebagai instansi yang ditunjuk harus meningkatkan kompetensinya untuk bisa melaksanakan tugas dalam mengawasi pemenuhan kewajiban wajib pajak dan mengkaji potensi kegiatan membangun sendiri yang belum dioptimalkan selama ini. Dalam hal ini hendaknya melakukan penelitian dan/atau pengkajian secara berkala terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak Pajak Pertambahan Nilai kegiatan membangun sendiri.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan seharusnya bertindak dengan tegas terhadap peraturan yang berlaku karena secara teori wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat himbauan dan atau teguran akan dilakukan verifikasi, namun dalam prakteknya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak terkadang tidak langsung menindaklanjuti untuk diverifikasi ataupun diperiksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dianggap lalai.